

Pesantren Kanggo Umat: Dekonstruksi Model Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kearifan Lokal Pesantren Menuju Keadilan Ekonomi Global

Aziz Abdillah

Universitas Islam Syarifuddin, Lumajang, Indonesia

E-mail: aziezabdillah@gmail.com

Article History:

Received: 16 Juni 2026

Revised: 03 September 2026

Accepted: 10 September 2026

Keywords:

Ekonomi Pesantren, Kearifan Lokal, Ekonomi Islam, Keadilan Ekonomi, Keberlanjutan.

Abstrak: Studi ini mengeksplorasi transformasi ekonomi pesantren di Indonesia melalui model "Pesantren Kanggo Umat"—kerangka ekonomi yang berpusat pada masyarakat dan berlandaskan kearifan lokal serta nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi praktik ekonomi pesantren konvensional dan merekonstruksi model alternatif yang mendorong keadilan distributif, keberlanjutan institusional, dan harmoni ekonomi global. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kasus kontekstual dan metode analisis isi, makalah ini mengkaji perkembangan historis, filosofis, dan institusional ekonomi berbasis pesantren. Temuan menunjukkan tiga model ekonomi dominan di pesantren: ekonomi berbasis amal, ekonomi produktif-mandiri, dan ekonomi transformasi digital tahap awal. Studi ini mengidentifikasi bahwa pesantren, ketika diberdayakan melalui etika spiritual (ikhlas, barokah, amanah), lembaga koperasi (Kopontren, INKOPONTREN, HEBITREN), dan inovasi digital, dapat menjadi agen kunci keadilan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Diskusi ini menekankan lima pilar model "Pesantren Kanggo Umat": spiritualitas dan etika, pendidikan dan literasi ekonomi, jaringan kelembagaan, kewirausahaan sosial, dan digitalisasi. Model ini menawarkan alternatif paradigmatis terhadap globalisasi kapitalis dengan memprioritaskan keseimbangan antara keuntungan, manusia, dan planet dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*. Kesimpulannya, model "Pesantren Kanggo Umat" berfungsi sebagai kerangka kerja transformatif yang menghubungkan spiritualitas lokal dengan keadilan ekonomi global, dengan implikasi signifikan bagi teori ekonomi Islam, kebijakan nasional, dan kontribusi Indonesia terhadap wacana ekonomi Islam global.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, terdapat dorongan kuat agar lembaga-agama Islam, terutama pondok pesantren, tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan dan dakwah tetapi juga sebagai aktor ekonomi masyarakat. Konsep “ekonomi kerakyatan” atau ekonomi rakyat menjadi sebuah upaya alternatif dalam merespon ketidakadilan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan dominasi model ekonomi kapitalistis yang sering dianggap kurang memperhatikan aspek sosial dan keadilan. Di Indonesia, pesantren memiliki potensi besar dalam kerangka ini, karena tidak hanya sebagai lembaga pendidikan tradisional, melainkan sebagai komunitas dengan modal sosial, kearifan lokal, dan jiwa solidaritas yang tinggi.

Menurut data Kementerian Agama RI, pada tahun 2023/2024 tercatat 39.551 pesantren dengan sekitar 4,9 juta santri. Dari total pesantren tersebut, sebagian belum sepenuhnya memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di sekitarnya. Salah satu contoh upaya nyata adalah program Kemandirian Pesantren, yang meskipun telah berjalan selama beberapa tahun, baru menjangkau sebagian kecil pesantren secara nasional. (Maarif, 2024)

Program Kemandirian Pesantren mengisyaratkan kesadaran nasional bahwa pesantren harus bertransformasi: tidak lagi sepenuhnya bergantung pada iuran santri dan donasi, tetapi juga membangun ekonomi produktif. Ini tercermin dalam beberapa studi kasus, seperti koperasi pesantren yang dikembangkan di pesantren Al-Qodiri, Jember, yang dijadikan pusat ekonomi mandiri. (Sholikhah, 2022) Juga studi tentang koperasi pesantren Al-Ikhlas di Magetan, yang menunjukkan bahwa koperasi berbasis santri (dari santri, oleh santri, untuk santri) mampu menghasilkan perputaran ekonomi signifikan dalam lingkungan pesantren. (Hamdani, 2025)

Di sisi lain, aspek filosofis-normatif ekonomi Islam menyediakan kerangka untuk menilai dan membangun keadilan ekonomi. Salah satu kerangka yang banyak dikaji adalah *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu tujuan syariah, yang mengutamakan perlindungan harta (*mal*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), agama (*dīn*), dan keturunan (*nashb*). Etika produksi Islami berbasis *maqāṣid* menjadi pilar kesejahteraan sosial-ekonomi sebab produk dan aktivitas ekonomi yang sehat bukan hanya soal profit, tetapi juga dampak sosial, keberlanjutan, dan keadilan. (Kholil, 2025)

Dengan latar belakang tersebut, paper ini mengusulkan gagasan *Pesantren Kanggo Umat* sebagai sebuah model ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal pesantren yang tidak hanya mempromosikan kemandirian lokal tetapi juga memenuhi tuntutan keadilan ekonomi global. “*Kanggo umat*” yang bermakna “untuk umat” menegaskan bahwa ekosistem ekonomi pesantren harus inklusif, tidak eksklusif, dan memiliki orientasi manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya komunitas pesantren sendiri.

Pertanyaan sentral yang ingin dijawab dalam paper ini adalah: bagaimana nilai-nilai kearifan lokal pesantren dapat dikonstruksi dan dikembangkan menjadi model ekonomi kerakyatan yang bukan hanya lokal dan regional, tetapi juga relevan untuk keadilan ekonomi pada skala global; apa kelemahan dari model yang saat ini ada; dan bagaimana bentuk rekonstruksi normatif dan praktisnya.

Secara garis besar, paper ini akan:

1. Memetakan praktik ekonomi pesantren di Indonesia yang menunjukkan kekuatan dan tantangan;
2. Mengkaji landasan normatif Islam (termasuk *maqāṣid al-syarī‘ah*) dan kearifan lokal sebagai sumber daya etis dan operasional;
3. Menyajikan kerangka model “Pesantren Kanggo Umat” sebagai rekonstruksi ekonomi kerakyatan berbasis pesantren; dan

Mengusulkan implikasi kebijakan dan strategi praktis agar model tersebut dapat diadopsi lebih luas dan berdampak terhadap keadilan ekonomi global.

LANDASAN TEORI

PESANTREN DAN EKONOMI KERAKYATAN: HISTORIS DAN FILOSOFIS

Sejarah dan Perkembangan Ekonomi Pesantren di Indonesia

Sejak abad ke-19 dan awal abad ke-20, pondok pesantren di Nusantara lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan agama — pengajaran kitab klasik (kitab kuning), hafalan Al-Qur'an, dan pembinaan akhlak. Namun, seiring waktu, banyak pesantren mengambil langkah-langkah mandiri dalam urusan ekonomi untuk menopang operasional, kebutuhan santri, dan pengembangan lingkungan pesantren.

Salah satu bukti historisnya adalah munculnya koperasi pondok pesantren (kopontren) sebagai mekanisme kolektif ekonomi di lingkungan pesantren. Dalam Ekonomi Pesantren Mustari (2012), disebutkan bahwa Yakub (1985) mengemukakan kiprah koperasi pesantren sejak era awal modernisasi pesantren sebagai respons terhadap kebutuhan internal pesantren. (Mustari, 2012)

Seiring dengan perkembangan, kopontren terus tumbuh, dengan pembinaan kelembagaan koperasi pesantren di tingkat nasional melalui Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN), yang berdiri pada 13 Juli 1994 guna memayungi koperasi-koperasi pesantren di seluruh Indonesia. (*INKOPONTREN - Koperasi Pesantren Indonesia*, t.t.)

Koperasi semacam ini memungkinkan pesantren tidak hanya sekadar mengumpulkan dana simpan-pinjam, tetapi juga mengelola unit usaha produktif, stok bahan pokok, distribusi, dan pengelolaan logistik internal yang mengurangi ketergantungan eksternal. (Amrullah, 2019)

Dalam perkembangannya, pesantren juga menginisiasi unit usaha—baik agribisnis (pertanian, peternakan) maupun usaha non-agrikultur (warung, kerajinan, teknologi) sebagai penerapan ekonomi kerakyatan dalam lingkungan pesantren. Studi Pengembangan Ekonomi Pesantren Berbasis di Kabupaten Probolinggo menunjukkan bagaimana pondok Nurul Jadid menggerakkan produk olahan hasil laut masyarakat pesisir melalui pemberdayaan lokal yang dipimpin oleh pesantren sebagai “motor” ekonomi lokal. (Riadi dkk., 2021)

Begitu pula dalam konteks resiliensi ekonomi pesantren, terutama di masa krisis (seperti pandemi COVID-19), sejumlah pesantren menunjukkan kemampuan adaptasi melalui diversifikasi usaha dan pemanfaatan modal lokal. Ali et al. (2024) dalam artikelnya menyebut pesantren sebagai institusi yang dapat menjadi penggerak ekonomi populis (populist economy), UMKM, dan ekonomi syariah dalam konteks ketahanan ekonomi. (Ali dkk., 2024)

Filosofi dan Nilai Islam dalam Ekonomi Kerakyatan Pesantren

Berbasis sejarah praktik, pesantren telah mengembangkan filsafat internal yang memadukan nilai-nilai Islam dengan semangat kolektivitas dan kemandirian. Nilai-nilai ini kemudian menjadi landasan filosofis bagi ekonomi pesantren sebagai bentuk ekonomi kerakyatan.

Etos “Barokah”, “Ikhlas”, dan Solidaritas

Pesantren menanamkan paradigma bahwa usaha ekonomi bukan semata-mata untuk keuntungan material semata, melainkan bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Konsep barokah (berkah) dan ikhlas menjadi etos yang membedakan usaha pesantren dari bisnis komersial murni. Nilai ini memicu sikap berbagi, harga wajar, dan keterbukaan terhadap kepentingan umat sekitar.

Demokrasi dan Partisipasi Komunal

Dalam praktik koperasi pesantren, keanggotaan sering meliputi santri, alumni, dan

masyarakat lingkungan. Prinsip musyawarah (syūrā) dan partisipasi kolektif menjadi dasar pengambilan keputusan. Gerakan koperasi pondok pesantren — sebagai koperasi internal pesantren — adalah wujud konkret prinsip ekonomi kerakyatan yang menekankan aksi bersama atas kepentingan bersama. (Mustari, 2012)

Keterkaitan dengan Ekonomi Kerakyatan Nasional

Gagasan ekonomi kerakyatan merujuk pada suatu sistem ekonomi yang menjunjung keadilan, pemerataan, dan partisipasi rakyat luas dalam produksi dan distribusi. Dalam konteks Indonesia, jargon seperti ekonomi gotong royong dan asas kekeluargaan (UUD 1945 Pasal 33) sering dikaitkan dengan idealisme ekonomi kerakyatan. (Saputra dkk., 2023)

Pesantren sebagai lembaga lokal yang terhubung langsung dengan masyarakat secara geografis dan sosial menjadi *platform ideal* untuk menerjemahkan ekonomi kerakyatan dalam praktik nyata. Dengan demikian, pondok pesantren bukan hanya institusi pendidikan agama, melainkan juga institusi ekonomi sosial yang berpotensi memperkuat jaringan lokal dan mempersempit jurang ketimpangan.

KEARIFAN LOKAL PESANTREN SEBAGAI SUMBER NILAI EKONOMI

Konsep Kearifan Lokal dalam Perspektif Islam

Kearifan lokal (*local wisdom*) dalam konteks Islam merupakan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang tumbuh dari pengalaman komunitas Muslim di suatu wilayah dan berakar pada ajaran Islam universal. Dalam bahasa Arab, konsep ini sejalan dengan istilah *al-‘urf al-shahīh*, yaitu kebiasaan baik yang diakui dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kearifan lokal bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga sumber etika ekonomi dan sosial yang mengarahkan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kearifan lokal di pesantren tidak hanya tercermin dalam tradisi keilmuan dan ibadah, tetapi juga sangat nyata dalam pengelolaan sumber daya ekonomi secara kolektif dan adil. Nilai-nilai seperti ukhuwah, keadilan, dan tolong-menolong menjadi landasan utama dalam membangun kemandirian ekonomi pesantren. (Anam dkk., 2025)

Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi moral bagi sistem ekonomi yang dikembangkan oleh pesantren — sistem yang tidak sekadar berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga memperhatikan *maslahah ‘ammah* (kemaslahatan umum). Dengan demikian, ekonomi pesantren berakar pada prinsip maqāsid al-syarī‘ah, di mana aktivitas ekonomi diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Manifestasi Kearifan Lokal dalam Ekonomi Pesantren

Kearifan lokal pesantren tercermin dalam berbagai aktivitas sosial-ekonomi yang bersifat partisipatif dan berbasis nilai. Beberapa wujud konkret di antaranya:

a. Prinsip Kemandirian dan Gotong Royong

Pesantren tumbuh di tengah masyarakat yang memiliki semangat gotong royong dan kemandirian tinggi. Prinsip ini tercermin dalam sistem ekonomi internal pesantren, seperti pendirian koperasi, warung santri, unit produksi roti, air mineral, dan usaha pertanian terpadu. Contoh yang menarik adalah Pesantren Sidogiri Pasuruan, yang berhasil membangun jaringan ekonomi pesantren melalui Koperasi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan Kopontren Sidogiri yang kini menjadi model nasional. Kopontren Sidogiri telah memiliki ratusan cabang di seluruh Indonesia dan dikenal mengintegrasikan semangat kemandirian, etika Islam, dan profesionalitas bisnis. Keberhasilan Sidogiri tidak hanya karena sistem manajemennya yang kuat, tetapi karena penanaman nilai barokah dan *khidmah lillāh* di antara pengelolanya. (Uyun

dkk., 2022)

b. Etika Produksi dan Konsumsi Islami

Kearifan lokal pesantren juga tampak dalam prinsip moderasi ekonomi (*al-wasathiyah*) yang diterapkan pada pola konsumsi dan produksi. Dalam banyak pesantren, praktik ekonomi tidak dilepaskan dari prinsip kejujuran (*sidq*), amanah, dan tanggung jawab sosial. Misalnya, Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo mengembangkan produk-produk olahan laut dengan prinsip ramah lingkungan dan melibatkan masyarakat sekitar, sehingga keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pesantren, tetapi juga masyarakat pesisir. (Anam dkk., 2025)

c. Sistem Keuangan Sosial dan Filantropi Islam

Pesantren selama ini memanfaatkan instrumen keuangan sosial Islam — seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) — bukan sekadar sebagai aktivitas amal, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi dan modal sosial yang menopang kegiatan ekonomi lembaga. Dalam praktiknya, wakaf produktif di banyak pesantren telah dipergunakan untuk mengembangkan unit-unit usaha (pertanian, peternakan, pelatihan keterampilan) yang berpotensi memperkuat kemandirian ekonomi pesantren dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Beberapa studi kasus menunjukkan pola pemanfaatan wakaf produktif yang sistematis: misalnya pemanfaatan lahan wakaf untuk program pertanian dan pelatihan keterampilan di Pondok Pesantren Tebuireng (Jombang), pengembangan *Job Training Center* dan program pertanian/perikanan di Darun Najah Pliken (Banyumas), serta inisiatif pemberdayaan pangan berbasis wakaf di beberapa pesantren lain yang berhasil meningkatkan kemandirian finansial lembaga. Studi-studi ini menegaskan bahwa wakaf produktif dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi jika dikelola secara profesional oleh nazhir yang kompeten. (Wijaya & Sukmana, 2020)

Selain wakaf, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang terorganisir (mis. melalui baitulmal, *Baitul Mal Wat Tamwil*, atau unit pengelola zakat pesantren) juga memainkan peranan penting dalam memenuhi kebutuhan mustahik internal (santri miskin, program makan, beasiswa) sekaligus membiayai program-program pemberdayaan. Pengelolaan ZISWAF yang baik dapat berfungsi sebagai instrumen redistribusi yang berkelanjutan dan mendorong investasi sosial lokal—selama ada transparansi, tata kelola yang jelas, dan mekanisme pemberdayaan penerima manfaat. (Suhendi, 2018)

Relevansi Kearifan Lokal Pesantren terhadap Pembangunan Ekonomi Global

Nilai-nilai lokal pesantren ternyata memiliki relevansi global, terutama dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer seperti ketimpangan, eksploitasi sumber daya, dan krisis moral ekonomi modern. Prinsip keberlanjutan, kebersamaan, dan keadilan distributif yang dijalankan oleh pesantren merupakan bentuk *alternative economics* yang mulai diakui oleh banyak kalangan akademisi ekonomi Islam.

Studi yang dilakukan oleh Fathurrahman (2025) menegaskan bahwa konsep *local wisdom-based Islamic economics* dapat menjadi model *paradigmatic alternative* terhadap kapitalisme global, karena mengedepankan keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan nilai spiritual. (Fathurrahman, 2025)

Dengan demikian, kearifan lokal pesantren bukanlah bentuk ekonomi tradisional yang tertinggal, melainkan *living tradition* yang mampu memberikan tawaran moral dan sistemik bagi ekonomi global yang berkeadilan. Pesantren, dengan modal sosial dan spiritualnya, berpotensi besar menjadi laboratorium sosial bagi pengembangan model ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan universal (*rahmatan lil 'ālamīn*).

DEKONSTRUKSI TERHADAP MODEL EKONOMI PESANTREN KONVENSIONAL

Paradigma Konvensional Ekonomi Pesantren

Selama beberapa dekade, model ekonomi pesantren di Indonesia umumnya masih didominasi oleh paradigma konservatif, dimana aktivitas ekonomi dipandang sebagai sarana sekunder, bukan bagian integral dari sistem pendidikan dan pemberdayaan umat. Fokus pesantren lebih banyak diarahkan pada pengajaran ilmu agama dan pembinaan moral, sedangkan aspek ekonomi sering kali dianggap sebagai pelengkap operasional.

Dalam praktiknya, banyak pondok pesantren masih mengandalkan sumber pendanaan dari sumbangan masyarakat, infak/sedekah, wakaf, iuran santri, dan bantuan pemerintah, sehingga pola pendanaan cenderung bersifat tidak menentu dan bergantung pada dukungan eksternal. Kondisi ini terlihat pada sejumlah studi manajemen pendanaan pesantren yang menemukan dominasi sumber dana pasif (donasi dan subsidi) dibandingkan pendapatan usaha mandiri. Ketergantungan semacam ini berpotensi menghambat kemandirian ekonomi jangka panjang apabila tidak diimbangi dengan pengembangan unit usaha produktif, pengelolaan wakaf yang profesional, dan diversifikasi sumber pendanaan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas manajerial, pembentukan unit usaha yang berkelanjutan, serta tata kelola ZISWAF yang transparan menjadi langkah penting untuk mengurangi kerentanan pendanaan pesantren dan mendorong kemandirian finansial Lembaga. (Pelealu dkk., 2025)

Selain itu, terdapat kesenjangan antara visi spiritual pesantren dan praktik ekonomi yang dijalankan. Aktivitas ekonomi sering kali hanya dimaknai sebagai *survival mechanism*, bukan sebagai bagian dari visi besar membangun keadilan sosial-ekonomi Islam. Akibatnya, pesantren kehilangan potensi strategisnya sebagai basis ekonomi kerakyatan dan pusat model pembangunan alternatif yang lebih berkeadilan.

Kritik terhadap Orientasi Amal dan Ketergantungan Eksternal

Dekonstruksi terhadap model ekonomi pesantren konvensional diperlukan karena masih kuatnya paradigma “ekonomi amal” (*charity-based economy*) dibandingkan “ekonomi produktif” (*productive-based economy*). Paradigma ekonomi amal mengandalkan semangat kedermawanan (*charity*) yang tinggi, tetapi sering kali tidak memiliki sistem kelembagaan ekonomi yang kokoh.

Lebih jauh lagi, orientasi amal yang tidak diiringi inovasi kelembagaan menyebabkan kegiatan ekonomi pesantren tidak berkembang secara berkelanjutan. Usaha kecil yang dijalankan sering kali bersifat *event-based*, seperti usaha konsumtif saat kegiatan besar pesantren (misalnya haul, wisuda, atau maulid), tanpa perencanaan jangka panjang atau sistem manajemen modern.

Dalam kerangka dekonstruksi, paradigma ini perlu dibaca ulang sebagai warisan transisi dari masa kolonial dan pasca-kemerdekaan, di mana pesantren berfungsi sebagai pusat perlawanan sosial dan moral, tetapi belum sempat membangun sistem ekonomi yang sistematis.

Dekonstruksi Filosofis: Dari Amal ke Produksi, dari Konsumtif ke Transformatif

Dekonstruksi filosofis terhadap ekonomi pesantren berarti melakukan pembacaan kritis terhadap makna “berkah” dan “ikhlas” dalam konteks ekonomi. Dalam pemahaman tradisional, dua konsep tersebut sering dimaknai secara pasif — berkah dianggap cukup dengan niat baik, sementara ikhlas sering diartikan sebagai penerimaan terhadap keterbatasan hasil. Namun, dalam pandangan ekonomi Islam kontemporer, berkah harus dikaitkan dengan produktivitas, efisiensi, dan kebermanfaatan sosial yang nyata.

Sebagaimana dijelaskan oleh Chapra (2000) dalam *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, berkah dalam ekonomi tidak akan hadir jika suatu sistem ekonomi tidak menghasilkan

kesejahteraan yang merata. Kesejahteraan (falāh) adalah hasil dari aktivitas produktif yang berorientasi pada keadilan, bukan dari pasivitas atau sekadar penerimaan terhadap nasib. (M. Chapra, t.t.)

Oleh karena itu, ekonomi pesantren harus bergeser dari “ekonomi pasif” menuju “ekonomi transformasional” yang melibatkan perencanaan, inovasi, dan orientasi nilai tambah. Dalam paradigma transformasional, pesantren bukan hanya mengajarkan etika bisnis, tetapi juga menciptakan struktur kelembagaan, teknologi, dan sistem pemasaran yang berkelanjutan.

Evaluasi Praktik dan Tantangan Struktural

Dekonstruksi juga harus mempertimbangkan faktor struktural yang menghambat perkembangan ekonomi pesantren. Terdapat empat tantangan utama dalam ekonomi pesantren di Indonesia: (Izza & Mi'raj, 2023)

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang manajemen dan keuangan.
2. Kurangnya akses terhadap pembiayaan syariah dan jejaring usaha produktif.
3. Belum adanya sinergi kebijakan nasional yang spesifik mendukung ekonomi pesantren secara sistematis.
4. Kesenjangan digital dan teknologi informasi yang membatasi pemasaran produk pesantren di era global.

Dengan demikian, dekonstruksi ekonomi pesantren bukan berarti meniadakan nilai-nilai lama, tetapi menafsirkan ulang dan memfungsikan kembali nilai-nilai spiritual dalam konteks produktivitas dan kemandirian modern. Semangat *ikhlas*, *barokah*, dan *khidmah lillāh* perlu dipahami secara aktif dan dinamis — menjadi energi moral bagi transformasi kelembagaan pesantren menuju kemandirian ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

REKONSTRUKSI MENUJU KEADILAN EKONOMI GLOBAL: “PESANTREN KANGGO UMAT” SEBAGAI MODEL ALTERNATIF

Landasan Rekonstruktif: Dari Spiritualitas Lokal Menuju Keadilan Global

Rekonstruksi model ekonomi pesantren tidak dapat dilepaskan dari dua fondasi utama: (1) nilai-nilai spiritual Islam yang bersifat universal, dan (2) kearifan lokal pesantren yang kontekstual dengan budaya masyarakat Indonesia. Gagasan “Pesantren Kanggo Umat” — secara harfiah berarti “Pesantren untuk Umat” — mencerminkan cita-cita transformasi pesantren dari lembaga religius tradisional menjadi institusi pemberdayaan ekonomi umat yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Konsep “Kanggo Umat” menekankan tiga prinsip pokok:

1. Kepemilikan komunal (*community ownership*), di mana kekayaan ekonomi dikelola secara kolektif oleh pesantren bersama masyarakat. (M. Chapra, t.t.)
2. Kemandirian spiritual (*spiritual independence*), yakni orientasi ekonomi yang berlandaskan nilai ibadah dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar akumulasi keuntungan. (Yuldafriyenti dkk., 2025)
3. Keadilan global (*global justice*), yang menghubungkan praktik ekonomi lokal pesantren dengan nilai-nilai universal Islam dalam keadilan distributif dan solidaritas lintas batas. (Muiz dkk., 2025)

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, rekonstruksi ini menegaskan bahwa keadilan ekonomi bukan sekadar pemerataan harta (*tawzī‘ al-tsarwah*), tetapi juga pemberdayaan agar umat mampu menjadi pelaku utama dalam sistem ekonomi. Al-Ghazali (dalam *Ihya’ Ulum al-Din*) menegaskan bahwa tujuan akhir dari aktivitas ekonomi adalah menjaga kehidupan manusia dengan

penuh martabat, tanpa ketimpangan dan eksploitasi. (Hidayat, 2024)

Pilar Model “Pesantren Kanggo Umat”

Model “Pesantren Kanggo Umat” dapat dirumuskan dalam lima pilar utama yang membentuk sistem ekonomi pesantren berkeadilan dan berkelanjutan:

a. Pilar Spiritualitas dan Etika

Spiritualitas menjadi fondasi pertama dari ekonomi pesantren. Prinsip *ikhlas*, *barokah*, dan *amanah* harus diterjemahkan ke dalam sistem kerja ekonomi yang profesional. Ekonomi Islam yang berkeadilan hanya dapat tumbuh jika etika spiritual menjadi kerangka institusional, bukan sekadar moral individu. (Yuldafriyenti dkk., 2025)

Dengan demikian, dalam model “Pesantren Kanggo Umat,” spiritualitas bukan penghambat efisiensi, melainkan sumber motivasi kerja dan disiplin ekonomi.

b. Pilar Pendidikan dan Literasi Ekonomi

Pesantren memiliki posisi strategis sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai. Karena itu, penguatan literasi ekonomi Islam menjadi kunci untuk mencetak santri yang mampu memahami dan mengelola usaha dengan prinsip syariah. Model ini menempatkan pesantren sebagai *center of economic literacy*, di mana pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan syariah, dan etika bisnis menjadi bagian integral dari kurikulum. (Mutmainnah dkk., 2025)

c. Pilar Kelembagaan dan Jaringan Ekonomi

Pesantren tidak dapat berdiri sendiri dalam membangun kemandirian ekonomi. Diperlukan sistem kelembagaan yang terhubung antar-pesantren melalui jaringan ekonomi kolektif, misalnya federasi koperasi pesantren, konsorsium bisnis halal, dan sinergi dengan lembaga keuangan mikro syariah.

Contoh konkret dapat ditemukan pada INKOPONTREN (Induk Koperasi Pondok Pesantren), yang sejak 1994 menjadi wadah koordinasi dan penguatan kapasitas ekonomi pesantren di seluruh Indonesia. (INKOPONTREN - Koperasi Pesantren Indonesia, t.t.) Dalam model “Pesantren Kanggo Umat,” jejaring semacam ini diproyeksikan lebih luas, termasuk kemitraan internasional dalam sektor *halal supply chain*, *green economy*, dan *Islamic finance*.

d. Pilar Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*)

“Pesantren Kanggo Umat” mengadopsi pendekatan *social entrepreneurship*, yaitu wirausaha yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki misi sosial dan lingkungan. Model ini dalam konsep *Triple Bottom Line*, yang menekankan keseimbangan antara *profit*, *people*, dan *planet*. Dalam konteks pesantren, ketiga aspek tersebut diterjemahkan sebagai keuntungan yang halal, kemaslahatan umat, dan kelestarian lingkungan. (Thoha, 2024)

Pondok Pesantren Tebuireng (Jombang), pengembangan *Job Training Center* dan program pertanian/perikanan di Darun Najah Pliken (Banyumas), serta inisiatif pemberdayaan pangan berbasis wakaf di beberapa pesantren lain yang berhasil meningkatkan kemandirian finansial lembaga. (Wijaya & Sukmana, 2020) Hal ini menjadi representasi nyata model “Pesantren Kanggo Umat” yang menyinergikan nilai religius dan keberlanjutan.

e. Pilar Digitalisasi dan Inovasi Ekonomi

Dalam era globalisasi dan disrupsi digital, pesantren harus melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi. Penggunaan *e-commerce halal platform*, digital marketing, dan sistem keuangan syariah digital menjadi sarana penting bagi pesantren untuk menembus pasar global.

Dalam era globalisasi dan disrupsi digital, pesantren dituntut untuk mengadopsi teknologi sebagai medium ekonomi. Penggunaan platform e-commerce halal, digital marketing,

dan sistem keuangan syariah digital menjadi sarana strategis agar pesantren dapat menembus pasar yang lebih luas. Sebagai bukti, Khakim (2025) menemukan bahwa digitalisasi ekonomi pesantren mulai merambah ekosistem fintech syariah dan memperluas akses keuangan inklusif. (Khakim, 2025) Demikian pula, Sayyid (2024) menunjukkan bahwa program santripreneur yang menggunakan digital marketing meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren. (Sayyid dkk., 2024) Dengan demikian, inovasi dan teknologi harus menjadi elemen inheren dalam rekonstruksi ekonomi pesantren agar mampu berkontribusi terhadap keadilan ekonomi global.

Kontribusi terhadap Keadilan Ekonomi Global

Konsep “Pesantren Kanggo Umat” tidak berhenti pada konteks lokal. Ia merupakan tawaran paradigmatis bagi pembentukan ekonomi Islam global yang lebih adil dan manusiawi. Prinsip yang diusungnya — keadilan, partisipasi, dan keseimbangan — selaras dengan konsep *global Islamic economy* yang menolak eksploitasi sumber daya dan ketimpangan struktural. Menurut Askari, Iqbal, dan Mirakhor (2015), ekonomi Islam ideal menempatkan keadilan distribusi sebagai inti dari pembangunan ekonomi global yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pesantren dapat menjadi agen transformatif yang menanamkan nilai-nilai ekonomi Islam kepada masyarakat luas, bahkan menjadi *role model* bagi lembaga pendidikan Islam di dunia Muslim lainnya. (Askari dkk., 2015)

Dengan demikian, model “Pesantren Kanggo Umat” menegaskan bahwa globalisasi ekonomi tidak harus berarti westernisasi atau kapitalisasi, tetapi dapat diarahkan menjadi globalisasi nilai, di mana pesantren menjadi sumber inspirasi etika global berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah* dan kearifan lokal Nusantara.

IMPLIKASI TEORETIS DAN PRAKTIS MODEL “PESANTREN KANGGO UMAT”

Implikasi Teoretis: Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam

Model “Pesantren Kanggo Umat” membawa implikasi penting dalam tataran konseptual bagi pengembangan teori ekonomi Islam. Pendekatan ini menawarkan model neo-institusional berbasis kearifan lokal, yang menempatkan lembaga pesantren sebagai aktor sosial-ekonomi dengan fungsi lebih luas dari sekadar entitas keagamaan. (Anam dkk., 2025)

Pertama, model ini memperluas pemahaman institusi ekonomi Islam — selama ini banyak dipahami sebagai bank syariah, asuransi syariah, atau BMT — menjadi ruang yang juga mencakup lembaga pendidikan, spiritualitas, dan produksi ekonomi secara terpadu. Hal ini memperkuat penelitian yang menunjukkan bahwa pesantren, lembaga pendidikan Islam, dan institusi filantropi kini berperan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi, pendidikan karakter, dan penguatan spiritualitas. Pesantren modern seperti Gontor dan Al-Yasini mengintegrasikan pendidikan, kewirausahaan, koperasi syariah, agribisnis, dan teknologi digital dalam satu ekosistem, sehingga santri tidak hanya religius tetapi juga produktif dan mandiri secara ekonomi. (Firmansyah, 2025)

Kedua, pentingnya nilai-kearifan lokal sebagai epistemologi ekonomi Islam semakin diakui dalam kajian Indonesia. Sebagai contoh, penelitian oleh S. Muliadi menunjukkan bahwa integrasi epistemologi ekonomi Islam dengan kearifan lokal menjadi langkah penting untuk menjawab kebutuhan sosial-ekonomi Indonesia. (Fathurrahman, 2025)

Ketiga, dalam ranah teori pembangunan Islam, konsep “Pesantren Kanggo Umat” memperkuat ide pemberdayaan akar rumput (*grass-roots empowerment*) yang berpijak pada keseimbangan antara kemaslahatan individu dan sosial (*maslahah ‘āmmah*). Model ini sejalan dengan pemikiran M. Umar Chapra bahwa manusia bukan hanya faktor produksi, melainkan subjek pembangunan ekonomi yang bermoral dan berorientasi akhirat. (Muliadi, 2018)

Dengan demikian, secara teoretis, model “Pesantren Kanggo Umat” berpotensi menjadi paradigma baru dalam studi ekonomi Islam kontemporer — sebuah model *local based global* yang menjembatani spiritualitas, sosialitas, dan produktivitas dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Implikasi Praktis: Pemberdayaan, Kebijakan, dan Penguatan Ekosistem

Dalam ranah praktis, model “Pesantren Kanggo Umat” menghadirkan langkah-langkah konkret bagi penguatan ekonomi umat berbasis pesantren. Implikasi ini dapat dilihat dari tiga level: mikro (pesantren dan masyarakat sekitar), meso (jaringan antar pesantren dan lembaga keuangan syariah), dan makro (kebijakan pemerintah dan arah pembangunan nasional).

a. Level Mikro: Pemberdayaan Ekonomi Santri dan Masyarakat

Model ini menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi santri dan masyarakat melalui penguatan kapasitas dasar seperti literasi keuangan, motivasi berwirausaha, dan keterampilan manajerial. Pesantren diharapkan mengintegrasikan pelatihan ekonomi, pengelolaan usaha, serta penguatan mindset kewirausahaan dalam kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler.

Temuan penelitian Amaria dkk. (2025) menunjukkan bahwa motivasi berwirausaha dan literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap meningkatnya minat wirausaha anggota Koperasi Pondok Pesantren Barokah. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika santri dan masyarakat pesantren dibekali pemahaman keuangan syariah serta dorongan mental yang kuat untuk berwirausaha, maka kemampuan mereka dalam membangun usaha produktif juga meningkat. Temuan ini memperkuat gagasan bahwa pengembangan ekosistem ekonomi pesantren harus dimulai dari peningkatan kapasitas sumber daya insani. (Amaria dkk., 2025)

Dalam konteks ini, implementasi program pemberdayaan di level mikro dapat dilakukan melalui optimalisasi unit-unit usaha pesantren seperti BMT pesantren, toko koperasi, maupun usaha mikro lainnya.

b. Level Meso: Penguatan Jaringan Ekonomi Pesantren

Pada level menengah, penguatan ekonomi pesantren memerlukan pembangunan jaringan kolaboratif antarpesantren dan lembaga pendukungnya. Konektivitas ini bukan hanya bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkuat daya saing pesantren dalam menghadapi dinamika pasar nasional. Kolaborasi melalui jaringan kelembagaan—seperti HEBITREN (Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren)—menjadi salah satu model yang mampu mengintegrasikan berbagai unit usaha pesantren dalam satu ekosistem ekonomi yang saling menopang.

Penelitian Rohimat dkk. (2024) menunjukkan bahwa penguatan literasi keuangan dan peningkatan kapasitas unit usaha dalam jaringan HEBITREN Solo Raya berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pesantren. Melalui pelatihan literasi keuangan, pendampingan usaha, serta integrasi antar-unit bisnis pesantren, jaringan HEBITREN mampu mendorong efisiensi usaha, memperbaiki tata kelola keuangan, serta memperluas peluang kemitraan. Temuan ini menegaskan bahwa jejaring ekonomi pesantren dapat menjadi motor penggerak ekonomi kolektif, bukan hanya bagi satu pesantren, tetapi juga bagi wilayah yang lebih luas. (Asep Maulana Rohimat dkk., 2024)

Dengan demikian, pembangunan jaringan ekonomi pesantren pada level meso tidak hanya bergantung pada kolaborasi formal, tetapi juga pada penguatan kapasitas internal melalui literasi keuangan, pengembangan unit usaha produktif, dan mekanisme pendampingan bisnis. Jaringan seperti HEBITREN, INKOPONTREN, atau asosiasi lain menjadi sangat strategis dalam meningkatkan daya tawar pesantren, memperbaiki rantai pasok, dan membangun

ekosistem ekonomi syariah yang kompetitif.

c. Level Makro: Integrasi dengan Kebijakan Nasional dan Global

Pada tataran makro, model “Pesantren Kanggo Umat” dapat dijadikan kerangka strategis dalam penguatan ekonomi Islam nasional melalui kebijakan publik yang berpihak pada pemberdayaan pesantren. Penelitian Ilmi dkk. (2025) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan program pendidikan kewirausahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan intensi berwirausaha di lingkungan pesantren, terutama ketika diintegrasikan dengan literasi ekonomi yang memadai. Hal ini menegaskan bahwa dukungan regulasi dan intervensi kebijakan menjadi faktor kunci dalam mendorong penguatan peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Ilmi & Sebayang, 2025)

Relevan dengan temuan tersebut, “Pesantren Kanggo Umat” dapat diintegrasikan ke dalam program-program nasional seperti pengembangan Pesantren Ekonomi Mandiri, penguatan koperasi pesantren, serta peningkatan literasi kewirausahaan yang difasilitasi oleh Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM, maupun lembaga terkait lainnya. Kebijakan yang berbasis peningkatan kapasitas ekonomi — terutama literasi keuangan dan kewirausahaan — terbukti dapat menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi pesantren.

Pada konteks global, model ini berpotensi menjadi representasi diplomasi ekonomi Islam Indonesia yang menampilkan pendekatan humanis, produktif, dan inklusif. Dengan penguatan kebijakan domestik yang mendukung kemandirian ekonomi pesantren, Indonesia dapat mempromosikan ekosistem pesantren sebagai praktik baik (*best practice*) dalam forum-forum ekonomi Islam internasional seperti *Islamic Development Bank (IsDB)* dan berbagai platform halal global. Dengan demikian, model “Pesantren Kanggo Umat” tidak hanya memiliki dampak nasional, tetapi juga dapat menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam percakapan global mengenai ekonomi syariah dan pembangunan berkelanjutan.

Tantangan Implementasi dan Arah Penguatan ke Depan

Walaupun memiliki potensi besar, implementasi model “Pesantren Kanggo Umat” menghadapi beberapa tantangan:

1. Keterbatasan SDM dan manajemen ekonomi di banyak pesantren tradisional.
2. Minimnya akses permodalan dan pendampingan bisnis profesional.
3. Kurangnya integrasi digitalisasi ekonomi yang dapat menjembatani pesantren ke pasar global.

Untuk itu, diperlukan strategi penguatan berbasis kolaborasi:

- a) Pelatihan manajemen ekonomi syariah dan kewirausahaan sosial bagi santri dan pengelola pesantren.
- b) Akses pembiayaan melalui BMT, Bank Wakaf Mikro, dan lembaga filantropi Islam.
- c) Digitalisasi sistem usaha pesantren melalui *e-marketplace halal* dan *platform* ekonomi kolaboratif.

Dengan langkah-langkah ini, pesantren akan mampu bertransformasi dari lembaga pendidikan keagamaan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat yang tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga berdaya saing global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan studi kasus kontekstual. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam fenomena ekonomi pesantren, nilai-nilai kearifan lokal yang

melandasinya, serta merumuskan model alternatif yang dapat direkonstruksi untuk menjawab tantangan keadilan ekonomi global.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperkaya dengan analisis dokumen dan studi kasus dari berbagai pesantren di Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi makna, nilai, dan praktik ekonomi pesantren yang berkembang secara historis dan sosiologis. Penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis, melainkan menggali dan merekonstruksi model ekonomi pesantren yang berkeadilan berdasarkan data tekstual dan kontekstual.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

1. Data Primer: Data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik ekonomi pesantren. Sumber primer utama meliputi peraturan perundang-undangan tentang pesantren, laporan Kementerian Agama, dokumen INKOPONTREN, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terbit dalam jurnal ilmiah terakreditasi.
2. Data Sekunder: Data sekunder mencakup buku-buku, artikel, dan tulisan ilmiah yang membahas tentang ekonomi Islam, kearifan lokal, pesantren, serta isu-isu keadilan ekonomi global. Penelusuran dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, DOAJ, dan SINTA dengan kata kunci: "ekonomi pesantren", "kearifan lokal", "ekonomi kerakyatan", dan "keadilan ekonomi global".

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi Dokumentasi: Mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen tertulis yang relevan, baik berupa jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, maupun kebijakan pemerintah terkait ekonomi pesantren.
2. Penelusuran Literatur Sistematis: Melakukan penelusuran literatur secara sistematis dengan kriteria inklusi: publikasi tahun 2015-2025, berbahasa Indonesia atau Inggris, dan memiliki relevansi langsung dengan topik ekonomi pesantren dan kearifan lokal.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Reduksi Data: Memilih dan menyederhanakan data yang terkumpul untuk difokuskan pada informasi yang relevan dengan rumusan masalah.
2. Kategorisasi: Mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori tematik berdasarkan pilar-pilar ekonomi pesantren, nilai-nilai kearifan lokal, dan elemen-elemen keadilan ekonomi.
3. Interpretasi: Memberikan makna terhadap temuan dengan menggunakan kerangka teori *maqāsid al-syarī'ah*, ekonomi kerakyatan, dan teori kearifan lokal.
4. Rekonstruksi Model: Menyusun kerangka model "Pesantren Kanggo Umat" berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan temuan yang dikelompokkan ke dalam empat bagian utama: (1) pemetaan praktik ekonomi pesantren di Indonesia, (2) identifikasi nilai-nilai kearifan lokal pesantren, (3) dekonstruksi model ekonomi pesantren konvensional, dan (4) rekonstruksi model "Pesantren Kanggo Umat" sebagai alternatif ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Pemetaan Praktik Ekonomi Pesantren di Indonesia

Berdasarkan hasil penelusuran literatur dan studi dokumentasi, praktik ekonomi pesantren di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama:

1. Model Ekonomi Amal (*Charity-Based Economy*): Model ini masih dominan di sebagian besar pesantren tradisional. Pesantren mengandalkan dana dari sumbangan masyarakat, infak, sedekah, wakaf, dan iuran santri sebagai sumber pendanaan utama. Pola ini bersifat tidak menentu dan bergantung pada dukungan eksternal, sehingga menghambat kemandirian ekonomi jangka panjang. Studi Pelealu et al. (Pelealu dkk., 2025) menunjukkan bahwa dominasi sumber dana pasif dibandingkan pendapatan usaha mandiri masih menjadi tantangan utama dalam manajemen pendanaan pesantren.
2. Model Ekonomi Produktif Mandiri: Beberapa pesantren telah mengembangkan unit usaha produktif seperti koperasi pesantren, agribisnis, dan unit usaha lainnya. Pesantren Sidogiri Pasuruan menjadi contoh keberhasilan dengan Koperasi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan Kopontren Sidogiri yang memiliki ratusan cabang di seluruh Indonesia (Uyun dkk., 2022). Demikian pula, pesantren Nurul Jadid di Probolinggo menggerakkan produk olahan hasil laut masyarakat pesisir melalui pemberdayaan lokal (Riadi dkk., 2021).
3. Model Ekonomi Transformasional Digital: Pada tahap awal, beberapa pesantren mulai mengintegrasikan teknologi digital dalam aktivitas ekonominya. Penggunaan *e-commerce halal platform*, digital marketing, dan sistem keuangan syariah digital mulai merambah ekosistem pesantren (Khakim, 2025; Sayyid dkk., 2024).
- 4.

Tabel 1. Pemetaan Praktik Ekonomi Pesantren di Indonesia

No	Model Ekonomi	Karakteristik	Contoh Pesantren	Sumber
1.	Ekonomi Amal	Ketergantungan donasi, kurang sistematis	Mayoritas pesantren tradisional	Pelealu et al., 2025
2.	Ekonomi Produktif Mandiri	Unit usaha mandiri, koperasi, agribisnis	Sidogiri (Pasuruan), Nurul Jadid (Probolinggo)	Uyun et al., 2022; Riadi et al., 2021
3.	Ekonomi Transformasional Digital	Digital marketing, <i>e-commerce</i> , <i>fintech</i>	Pesantren inovatif di Lamongan, dll.	Khakim, 2025; Sayyid et al., 2024

Identifikasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pesantren

Penelitian ini mengidentifikasi tiga nilai utama kearifan lokal pesantren yang menjadi fondasi ekonomi kerakyatan:

1. Etos Barokah dan Ikhlas: Pesantren menanamkan paradigma bahwa usaha ekonomi bukan semata-mata untuk keuntungan material, melainkan bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Konsep barokah dan ikhlas menjadi etos yang membedakan usaha pesantren dari bisnis komersial murni. (Uyun dkk., 2022)
2. Prinsip Gotong Royong dan Partisipasi Komunal: Pesantren tumbuh di tengah masyarakat yang memiliki semangat gotong royong dan kemandirian tinggi. Prinsip ini tercermin dalam sistem ekonomi internal pesantren, seperti pendirian koperasi, unit produksi, dan usaha pertanian terpadu. (Anam dkk., 2025)
3. Sistem Keuangan Sosial Islam: Pesantren memanfaatkan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai mekanisme redistribusi dan modal sosial yang menopang kegiatan ekonomi lembaga. Wakaf produktif di banyak pesantren telah dipergunakan untuk mengembangkan unit-unit usaha yang berpotensi memperkuat kemandirian ekonomi pesantren. (Suhendi, 2018; Wijaya & Sukmana, 2020)

Dekonstruksi Model Ekonomi Pesantren Konvensional

Analisis kritis terhadap model ekonomi pesantren konvensional menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan struktural yang perlu didekonstruksi:

1. Paradigma Ekonomi Pasif: Aktivitas ekonomi sering kali hanya dimaknai sebagai mekanisme bertahan hidup (*survival mechanism*), bukan sebagai bagian dari visi besar membangun keadilan sosial-ekonomi Islam. Paradigma ini membuat pesantren kehilangan potensi strategisnya sebagai basis ekonomi kerakyatan.
2. Orientasi Amal yang Berlebihan: Model ekonomi pesantren yang berorientasi amal berisiko menimbulkan *dependency culture* di kalangan santri dan masyarakat sekitar, di mana pesantren dipersepsikan hanya sebagai lembaga penerima bantuan, bukan penggerak ekonomi umat.
3. Keterbatasan Kelembagaan dan Manajemen: Terdapat empat tantangan utama yang menghambat perkembangan ekonomi pesantren: (a) keterbatasan SDM di bidang manajemen dan keuangan, (b) kurangnya akses terhadap pembiayaan syariah, (c) belum adanya sinergi kebijakan nasional, dan (d) kesenjangan digital (Izza & Mi'raj, 2023).

Dekonstruksi filosofis terhadap ekonomi pesantren berarti melakukan pembacaan kritis terhadap makna "berkah" dan "ikhlas" dalam konteks ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh (M. Chapra, t.t.), berkah dalam ekonomi tidak akan hadir jika suatu sistem ekonomi tidak menghasilkan kesejahteraan yang merata. Kesejahteraan (*falāh*) adalah hasil dari aktivitas produktif yang berorientasi pada keadilan, bukan dari pasivitas atau sekadar penerimaan terhadap nasib.

Rekonstruksi Model "Pesantren Kanggo Umat"

Berdasarkan hasil dekonstruksi dan identifikasi nilai-nilai kearifan lokal, penelitian ini merumuskan model "Pesantren Kanggo Umat" dengan lima pilar utama:

1. Pilar Spiritualitas dan Etika
Spiritualitas menjadi fondasi pertama dari ekonomi pesantren. Prinsip *ikhlas*, *barokah*, dan *amanah* harus diterjemahkan ke dalam sistem kerja ekonomi yang profesional. Ekonomi Islam yang berkeadilan hanya dapat tumbuh jika etika spiritual menjadi kerangka institusional, bukan sekadar moral individu (Yuldafriyenti dkk., 2025).
2. Pilar Pendidikan dan Literasi Ekonomi
Pesantren memiliki posisi strategis sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai. Penguatan literasi ekonomi Islam menjadi kunci untuk mencetak santri yang mampu memahami dan mengelola usaha dengan prinsip syariah. Penelitian Mutmainnah et al. (Mutmainnah dkk., 2025)

menunjukkan bahwa integrasi pendidikan agama dan kewirausahaan di pesantren berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

3. **Pilar Kelembagaan dan Jaringan Ekonomi**
Pesantren memerlukan sistem kelembagaan yang terhubung antar-pesantren melalui jaringan ekonomi kolektif, seperti INKOPONTREN, HEBITREN, dan sinergi dengan lembaga keuangan mikro syariah. Jaringan ini berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi kolektif yang meningkatkan daya saing pesantren (Ali dkk., 2024; Asep Maulana Rohimat dkk., 2024).
4. **Pilar Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*)**
Model ini mengadopsi pendekatan *social entrepreneurship* yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki misi sosial dan lingkungan. Konsep *Triple Bottom Line* yang menekankan keseimbangan antara *profit*, *people*, dan *planet* diterjemahkan dalam konteks pesantren sebagai keuntungan halal, kemaslahatan umat, dan kelestarian lingkungan (Thoha, 2024).
5. **Pilar Digitalisasi dan Inovasi Ekonomi**
Pesantren harus melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Penggunaan platform *e-commerce halal*, digital marketing, dan sistem keuangan syariah digital menjadi sarana penting bagi pesantren untuk menembus pasar global (Khakim, 2025; Sayyid dkk., 2024).

KESIMPULAN

Paper ini telah menegaskan bahwa pesantren memiliki potensi strategis dalam membangun model ekonomi alternatif yang berkeadilan, berbasis nilai-nilai lokal dan universal Islam. Melalui konsep “Pesantren Kanggo Umat”, pesantren tidak lagi dipahami hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial-ekonomi yang menumbuhkan solidaritas, kemandirian, dan keberlanjutan.

Dari hasil analisis historis dan filosofis, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai ekonomi kerakyatan di pesantren — seperti ikhlas, barokah, gotong royong, dan amanah — merupakan bentuk praksis dari ajaran Islam tentang keadilan distributif (*al-‘adl al-iqtisādī*) dan tanggung jawab sosial (*mas’ūliyyah ijtimā’iyyah*). Nilai-nilai ini, ketika dikelola dengan sistem kelembagaan yang adaptif dan berbasis pengetahuan modern, mampu melahirkan pola ekonomi Islam yang tidak eksploitatif, melainkan partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Model “Pesantren Kanggo Umat” dengan lima pilarnya — spiritualitas, pendidikan, kelembagaan, kewirausahaan sosial, dan digitalisasi — menunjukkan bahwa ekonomi Islam berbasis pesantren dapat menjadi model ekonomi moral dan kolaboratif yang mampu menjawab tantangan globalisasi ekonomi kapitalistik. Model ini tidak menolak pasar, tetapi menundukkannya pada nilai-nilai kemaslahatan dan keberlanjutan manusia.

Secara teoretis, model ini memberi kontribusi baru bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam kontekstual (*Islamic contextual economics*), yang berpijak pada epistemologi kearifan lokal pesantren. Sementara secara praktis, ia menawarkan arah strategis bagi kebijakan pemerintah dan dunia pesantren untuk memperkuat sistem ekonomi syariah nasional serta memperluas peran pesantren dalam diplomasi ekonomi Islam global.

Dengan demikian, gagasan “Dari Kearifan Lokal Menuju Harmoni Global” menemukan manifestasinya secara konkret dalam praksis ekonomi pesantren — yaitu bagaimana nilai-nilai lokal seperti gotong royong, kesederhanaan, dan spiritualitas diartikulasikan menjadi energi moral yang memengaruhi sistem ekonomi global yang lebih adil dan berimbang.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini berbasis pada studi kepustakaan dan dokumentasi, sehingga belum melakukan observasi lapangan secara langsung untuk memverifikasi praktik ekonomi pesantren yang dikaji. Kedua, cakupan studi kasus yang digunakan terbatas pada pesantren-pesantren yang telah terdokumentasi dalam literatur ilmiah, sehingga belum mencakup seluruh variasi model ekonomi pesantren di Indonesia. Ketiga, penelitian ini belum menguji secara empiris efektivitas model "Pesantren Kanggo Umat" dalam konteks implementasi nyata.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan yang lebih mendalam dengan metode etnografi atau studi kasus multi-situs untuk memverifikasi dan menguji model "Pesantren Kanggo Umat" secara empiris. Selain itu, penelitian kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi dari penerapan model ini terhadap kesejahteraan santri dan masyarakat sekitar juga sangat diperlukan. Penelitian komparatif antar-pesantren yang menerapkan model ekonomi berbeda juga dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang faktor-faktor determinan keberhasilan ekonomi pesantren.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, J. A., Tri Pambekti, G., Baroroh, H., Hassany, E. E. J. P., & Insani Saibil, D. (2024). RESILIENSI EKONOMI PESANTREN MELALUI HOLDING BISNIS HEBITREN: APLIKASI ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT. *DEVOSI*, 5(2), 130–151. <https://doi.org/10.33558/devosi.v5i2.9416>
- Amaria, H., Maknunah, L. U., & Avelina, N. F. (2025). PENGARUH MOTIVASI BERWIRAUSAHA DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP MINAT WIRAUSAHA PADA ANGGOTA KOPERASI PONDOK PESANTREN BAROKAH. 9(3), 1514–1527. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v9i3.6557>
- Amrullah, A. (2019). Analisis Manajemen Pengelolaan Koperasi Pesantren dalam Mewujudkan Kemandirian Pesantren Ummul Ayman Samalanga. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1(2), 257–277. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i2.36>
- Anam, S., Yaqin, A., & Hosim, M. A. (2025). TRANSFORMATION OF PESANTREN ECONOMIC MANAGEMENT TOWARD SELF-RELIANCE BASED ON LOCAL WISDOM. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 71–79. <https://doi.org/10.33650/profit.v9i1.11108>
- Asep Maulana Rohimat, Astiti, R. D., Arifin, M. R., & Mahmudulhassan. (2024). Entrepreneurial Interest Among “Santri” in HEBITREN and Its Impact on SMEs. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 8(2), 159–167. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v8i2.6909>
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2015). *Introduction to Islamic Economics*. John Wiley & Sons.
- Fathurrahman, A. (2025). Rediscovering Local Wisdom: A Cultural Turn in Islamic Economic Education. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 9(2), 254–263. <https://doi.org/10.18196/jeress.v9i2.27587>
- Firmansyah, I. (2025). Gontor and Community Economic Empowerment. *The Economic Review of Pesantren*, 3(1). <https://doi.org/10.58968/erp.v3i1.589>
- Hamdani, H. (2025). MODEL KOPERASI PESANTREN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI:

-
- STUDI KOPONTREN AL-IKHLAS MAGETAN JAWA TIMUR. *Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 249–258. <https://doi.org/10.56997/investama.v10i2.2393>
- Hidayat, D. (2024). PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI. *Dirasa Islamiyya: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 148–172. <https://doi.org/10.61630/dijis.v2i2.37>
- Ilmi, M. R., & Sebayang, K. D. A. (2025). Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Pendidikan Kewirausahaan terhadap Intensi Berwirausaha Pesantren melalui Literasi Ekonomi di Indonesia. 4(5), 7766–7775. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i5.9432>
- INKOPONTREN - Koperasi Pesantren Indonesia. (t.t.). Diambil 11 November 2025, dari <https://www.inkopontren.com/>
- Izza, N. N., & Mi'raj, D. A. (2023). A Qualitative Analysis on Pesantren Economic: NVivo Approach. 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.58968/erp.v2i1.206>
- Khakim, I. (2025). DIGITALISASI EKONOMI PESANTREN : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN FINTECH SYARIAH DI LINGKUNGAN SANTRI. *Islamic Banking and Finance*, 8(1), 171–178. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8\(1\).22675](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8(1).22675)
- Kholil, S. (2025). ETIKA PRODUKSI ISLAMI BERBASIS MAQASHID AL-SHARIAH: PILAR KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(1), 13–25. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1220>
- M. Chapra, U. (t.t.). *The Future of Islamic Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation, 2000. (Perpustakaan UI, Lantai 2).
- Maarif, S. (2024, Oktober 11). Melihat Ekosistem Kemandirian Pesantren. *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://kemenag.go.id/kolom/melihat-ekosistem-kemandirian-pesantren-mPgBg>
- Muiz, A., Aini, S. Q., & Noh, M. S. B. M. (2025). Sustainability of Islamic Boarding Schools through Empowerment of the People's Economy by Community-Based Development Theory. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 357–368. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i1.1803>
- Muliadi, S. (2018). EPISTEMOLOGI EKONOMI ISLAM DAN MAQASID SYARIAH DALAM KURIKULUM EKONOMI ISLAM DI PERGURUAN TINGGI. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.32678/ije.v9i2.102>
- Mustari, M. (2012). *Ekonomi Pesantren: Manajemen Pesantren dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Lintang Publishing.
- Mutmainnah, Waston, & Muhammad Sholahuddin. (2025). Integrating Religious and Economic Education for Sustainable Development Goals (SDGs): An Analysis of Entrepreneurial Models in Indonesian Pesantren. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 25(02), 287–302. <https://doi.org/10.23917/profetika.v25i02.7801>
- Pelealu, N. D., Nidhomillah, A. R. F., Sumiati, & Fikri, S. (2025). Analisis Manajemen Pendanaan di Pondok Pesantren Salaf Hidayatuth-Tholibin. *Mudir : Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 36–44. <https://doi.org/10.55352/mudir.v7i1.1397>
- Riadi, L., Febrianto, A., & Saifuddin, S. (2021). PENGEMBANGAN EKONOMI PESANTREN BERBASIS KEARIFAN LOKAL. *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, 5(2), 78. <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v5i2.322>
- Saputra, A. A., -, D., & Kadarsih, S.-. (2023). Peran Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Jarinabi Mart dalam Meningkatkan Ekonomi Pondok Pesantren Jarinabi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4038. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10820>
-

-
- Sayyid, M., Yeni Suyanto, U., Abadi, M. D., Ni'mah, J. L., & Cahyani, R. I. (2024). Peran Digitalisasi dan Program Santripreneur melalui pendekatan SDGs dalam mewujudkan kemandirian Pondok pesantren (Studi Pada Ponpes Besar di Kab. Lamongan). *Owner*, 8(2), 1085–1100. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1926>
- Sholikhah, V. (2022). Implementasi Strategi Pengembangan Koperasi Pesantren Sebagai Pusat Ekonomi Mandiri di Pesantren Al-Qodiri Jember. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(2), 104–113. <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1636>
- Suhendi, H. H. (2018). OPTIMALISASI ASET WAKAF SEBAGAI SUMBER DANA PESANTREN MELALUI PELEMBAGAAN WAKAF (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah). *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3417>
- Thoha, A. F. K. (2024). Visionary Leadership and Dynamic Capabilities: Transforming Pesantren into a Social Enterprise. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 9(1), 46. <https://doi.org/10.30659/ijibe.9.1.46-62>
- Uyun, J., Malia, E., & Kusuma, N. A. (2022). ENTITAS BISNIS PONDOK PESANTREN: ANTARA NILAI BAROKAH DAN GOING CONCERN. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 10(01), 22–32. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.10.01.22-32>
- Wijaya, M. W., & Sukmana, R. (2020). Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren (Studi kasus Pesantren Tebuireng Yayasan Hasyim Asyari Jombang). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(5), 1072. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20195pp1072-1085>
- Yuldafriyenti, Kamal, T., Hakim, R., Hakim Hanafi, A., & Zulhadi. (2025). Keberadaan Pendidikan Pondok Pesantren dalam Perkembangan Spritual dan Kultural Masyarakat. *Al-Mau'izhoh*, 6(2), 1225–1237. <https://doi.org/10.31949/am.v6i2.10582>